

Judul : RAPBN 2017 Kurang Sehat
 Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
 Surat Kabar : Republika
 Halaman : 1

RAPBN 2017 Kurang Sehat

• DEBBIE SUTRISNO,
 MUHAMMAD NUFUSANSYI

Dana pinjaman selama ini hanya untuk melunasi utang masa lalu.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyampaikan RAPBN 2017 beserta nota keuangannya dalam Sesi Paripurna I DPR di gedung DPR/MPR Jakarta Selasa (16/8). Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pemerintah ini kurang sehat.

Presiden menjelaskan, kebijakan strategis RAPBN 2017 adalah menekankan pembangunan infrastruktur dan efisiensi. "Pemerintah meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan ko-

nektivitas antarwilayah," katanya. Dalam hal ini, Presiden menilai, pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran yang semakin penting. Menurut dia, melalui transfer dana daerah, kelak pemda bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan.

Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran saat ini dan RAPBN 2017 kurang sehat. Pada tahun ini, ia memperkirakan penerimaan pajak berkurang Rp 219 triliun. Ini memicu penangkasan anggaran kementerian dan transfer ke daerah Rp 133,8 triliun.

Dalam RAPBN 2017, transfer da-

na ke daerah juga mengalami perubahan. Pada APBNP 2016, transfer ke daerah Rp 729,270,8 triliun sedangkan alokasi RAPBN 2017 hanya Rp 700,026,7 triliun. "Soal dana daerah, beberapa pos akan lebih rendah, tapi beberapa pos akan kami *carry over*," ujar Sri.

Sri juga menyebut, anggaran pemerintah kurang sehat karena terjadi defisit primer dalam RAPBN 2017 mencapai Rp 111,4 triliun. "APBN yang keseimbangan primernya defisit itu sebetulnya kurang sehat. Kita harus hati-hati," kata Sri dalam konferensi pers RAPBN 2017.

Keseimbangan primer yang negatif, ungkap Sri, memperlihatkan pemerintah seolah ini melakukan pembiayaan dana hanya untuk pembiayaan utang. "Jadi sebetulnya, pemerintah meminjam bukan untuk berinvestasi, melainkan menyervis utang masa lalu."

Terkait dengan hal ini, menurut Sri, alokasi untuk pembayaran bunga utang RAPBN 2017 melonjak dibandingkan APBNP 2016. Semula Rp 191,218,3 triliun, tetapi pada RAPBN 2017 meningkat menjadi 221,405,1 triliun.

Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya mengalami defisit absolut sebesar Rp 332,8 triliun, melainkan juga menghadapi permasalahan defisit primer.

Sri menambahkan, keseimbangan primer yang defisit ini juga karena pemerintah kurang bijak mengelola utang dengan suku bu-

nga serendah mungkin. Ia menentukan, meski penerimaan cukup sulit, dana alokasi umum ke semua daerah tak akan lebih rendah. "Tidak ada daerah yang dibayarkan karena penerimaan rendah," kata Sri. Pada RAPBN 2017 besarnya Rp 404,739,5 triliun, sebelumnya Rp 385,360,8 triliun.

Dengan pengalihan wewenang lebih banyak ke pemda, ia mendorong dana untuk daerah ditingkatkan. Meski demikian, tidak semua daerah akan mendapatkan nilai transfer anggaran yang sama. Lewat dana alokasi khusus daerah berpotensi mendapatkan ukuran lebih besar.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bi-

Postur RAPBN 2017 (triliun)

Pendapatan	Rp 1.737,6
Penerimaan Pajak	Rp 1.455,8
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 240,3
Hibah	Rp 1,3
Belanja	Rp 2.070,4
Belanja Pemerintah Pusat	Rp 1.310,4
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Rp 760,0
Defisit	Rp 332,8

Anggaran Terbesar Kementerian/Lembaga (triliun)

Kementerian PUPR	Rp 105,5
Kementerian Pertahanan	Rp 104,4
Poli	Rp 72,4
Kementerian Agama	Rp 60,7
Kementerian Kesehatan	Rp 58,2

Sumber: nota keuangan rapbn 2017

dang Ekonomi dan Keuangan Eky Awal Muharam menilai, RAPBN 2017 telah ambisius dan kurang realistis, termasuk target penerimaan perpajakan. "Kita harus beringat dari situasi perpajakan 2015 dan 2016. Belum ada yang menggembirakan."

Meskipun pemerintah telah mengulirkan pengumpulan pajak sebagai senjata andalan, ia menilai situasi 2017 kurang lebih masih sama. Penerimaan pajak 2015 yang hanya tercapai 83,2 persen atau setara dengan Rp 1.240 triliun dari target APBN, harus menjadi pelajaran.

Realisasi tersebut lebih rendah daripada penerimaan perpajakan 2014 yang mencapai 92,04 dan 2013 sebesar 93,81 persen serta 2012 yang mencapai 94,4 persen.

Ia menjelaskan, beberapa potensi yang menyebabkan risiko *shortfall* penerimaan pajak, yaitu harga komoditas dunia masih belum membaik dan rencana penurunan PPh badan dari 25 persen menjadi 20 persen.

Dari sisi belanja, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara Prasetyo mengatakan, penangkasan transfer dana ke daerah hingga 4,18 persen dapat mendorong pemda lebih mandiri. Namun, dampak lainnya adalah mengganggu proyek yang dijalankan pemda. Karena itu, ia menyarankan, dalam skema efisiensi anggaran, pemerintah dapat menyiapkan peta jalan yang lebih jelas.

■ *debbie.sutrisno@detik.com*